

PEMERINTAH KOTA TERNATE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini dibuat dalam rangka akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2010 yang terdiri atas Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan Realisasi Anggaran. Dalam penyusunan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2010, disepakati antara pihak legislatif dan eksekutif, untuk secara bertahap mengikuti petunjuk sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 13 untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2010.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan terdiri:

Bab I. Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran. Penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap perubahan posisi Neraca dan Laporan Arus Kas. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan, sekaligus memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang dicerminkan melalui indikator pencapaian target kinerja. Menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintah daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan.

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

Menyajikan informasi tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, penerapan kebijakan basis kas atau basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yaitu Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, dan komponen-komponen Laporan Arus Kas.

Memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Program dan kebijakan pembangunan Kota Ternate bidang ekonomi pada tahun 2010 telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan perekonomian di Kota Ternate, yang secara langsung memberikan dampak positif terhadap sektor pemberi kontribusi dan sekaligus menjadi *multiplyer efek* bagi sektor-sektor lainnya, serta mampu membuat perekonomian di Kota Ternate berkembang dengan trend yang meningkat.

Dalam kurun waktu satu tahun perekonomian Kota Ternate ditinjau dari ekonomi makro, memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi yang telah terimplementasi pada setiap program dan kegiatan SKPD telah memberikan dampak yang positif baik pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, maupun peningkatan pada beberapa indikator ekonomi makro lainnya, sehingga perwujudan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Ternate Insya Allah dapat tercapai.

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan keberhasilan perekonomian suatu wilayah parameternya adalah indikator ekonomi, yaitu dengan melihat seberapa besar perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Ternate. Pertumbuhan ekonomi ini diartikan sebagai pertumbuhan produksi barang dan jasa yang diukur oleh nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi.

Kami menyadari bahwa pembangunan dibidang ekonomi tidak selalu berorientasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperlihatkan trend peningkatan, akan tetapi diharapkan bahwa ke depan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga harus diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata sehingga kesenjangan dan ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat serta kesenjangan antar wilayah, khususnya pada kecamatan-kecamatan yang berada di luar pulau Ternate, diharapkan dapat terdistribusi secara adil dan merata.

Posisi Kota Ternate sebagai Kota Kepulauan dengan 7 (tujuh) Kecamatan, sejak dahulu dikenal sebagai Kota Perdagangan dan saat ini sebagai pintu gerbang Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate memiliki nilai lebih dari sudut pandang ekonomi dibanding daerah lain di Provinsi Maluku Utara. Hal ini dikarenakan peranan beberapa sektor ekonomi yang merupakan sektor-sektor yang bercirikan perkotaan seperti sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa dan sektor transportasi dan komunikasi di Kota Ternate lebih dominan dibanding kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara.

Selama satu tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kota Ternate mampu tumbuh sebesar 7,99%. Ini menunjukkan adanya kemampuan pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan sebesar ini dapat dikatakan bahwa sektor-sektor ekonomi telah berperan dengan optimal yang bersinergi dengan implementasi sejumlah program/kegiatan pendukung SKPD, sehingga mampu menciptakan nilai tambah pada barang dan jasa di sektor-sektor tersebut.

Sektor-sektor ekonomi yang selama beberapa tahun terakhir memberikan andil besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate seperti perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa, masih tetap menjadi sektor yang memberi andil besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Ternate.

Adanya investasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta secara sinergis juga telah mampu mendorong berbagai perkembangan usaha di Kota Ternate. Pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, perbankan dengan permodalan usaha serta pengembangan dan perluasan usaha dari investasi swasta, telah mampu menjaga angka trend pertumbuhan ekonomi dan juga telah mampu menyerap tenaga kerja yang bertambah setiap tahunnya di Kota Ternate.

Dari sembilan sektor ekonomi PDRB Kota Ternate, peranan tiga sektor ekonomi memberikan peran besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Ternate. Namun peranan keenam sektor ekonomi lainnya tidak dapat dikatakan kecil karena perkembangan dari ketiga sektor tersebut tidak terlepas dari adanya peran dan kemampuan berkembangnya keenam sektor tersebut dalam memberikan kontribusi pada pendapatan per kapita masyarakat.

Pendapatan per kapita masyarakat Kota Ternate mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, dimana pada tahun 2009 sebesar Rp2.576.212,00 meningkat menjadi Rp2.778.299,00 pada tahun 2010. Peningkatan ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan produktifitas pada sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Salah satu indikator makro ekonomi lainnya adalah inflasi. Makna dari inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga. Perkembangan harga dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat serta berhubungan dengan produktifitas ekonomi masyarakat.

Inflasi Kota Ternate pada tahun 2010 adalah 5,32% relatif rendah bila dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 6,96%. Secara umum kelompok bahan makanan menjadi penyumbang terbesar terjadinya inflasi di Kota Ternate.

Pertumbuhan jumlah penduduk berhubungan erat dengan permasalahan ketenagakerjaan. Peningkatan jumlah angkatan kerja belum sebanding dengan kesempatan kerja. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran menjadi tinggi.

Untuk mengukur tingkat pengangguran digunakan pengukuran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi berdampak besar pada permasalahan dibidang sosial terutama kemiskinan. TPT di Kota Ternate pada tahun 2010 sebesar 10,31% lebih baik dari tahun 2009 yaitu sebesar 11,31% (hasil Rakernas Agustus 2010), ini menunjukkan bahwa telah terjadi penyerapan tenaga kerja di wilayah ini sebagai dampak adanya perkembangan usaha.

Keterkaitan antara pembangunan di bidang ekonomi dengan pembangunan di bidang sosial dalam hal pencapaian keberhasilannya dapat dihitung dengan suatu penghitungan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia secara konsep dapat dikatakan sebagai pencapaian keseluruhan suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga indeks yaitu Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pendapatan.

Nilai IPM Kota Ternate yang dihitung secara nasional pada tahun 2009 sebesar 76,13%, meningkat dibanding tahun 2008 sebesar 75,66% dan secara peringkat nasional, Kota Ternate berada pada peringkat 42.

Dengan nilai IPM tersebut dapat dikatakan bahwa pembangunan di bidang sosial meliputi kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi telah mampu memberikan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat secara umum di Kota Ternate.

2.2 Kebijakan Keuangan

A. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Ternate.

Untuk tahun 2010, satker yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate meliputi 40 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yaitu:

NO.	URAIAN
1	Dinas Pendidikan Nasional
2	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
3	Dinas Kesehatan
4	Kantor Pemadam Kebakaran
5	Dinas Tata Kota dan Pertamanan
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Dinas Perhubungan
8	Dinas Kebersihan
9	Badan Lingkungan Hidup
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11	Kantor Pemberdayaan Perempuan
12	Kantor Keluarga Berencana
13	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
16	Dinas Pemuda dan Olah Raga
17	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
18	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
19	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20	Sekretariat Daerah
21	Sekretariat DPRD
22	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
23	I n s p e k t o r a t
24	Kecamatan Kota Ternate Utara
25	Kecamatan Kota Ternate Selatan
26	Kecamatan Pulau Ternate
27	Kecamatan Moti
28	Kecamatan Kota Ternate Tengah
29	Kecamatan Pulau Batang Dua
30	Kecamatan Pulau Hiri
31	Badan Penanggulangan Bencana Alam
32	Badan Kepegawaian Daerah
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat
34	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
35	Kantor Komunikasi dan Informatika
36	Dinas Pertanian dan Kehutanan
37	Balai Informasi & Penyuluhan Pertanian
38	Dinas Kelautan dan Perikanan
39	Dinas Pasar
40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Laporan keuangan dihasilkan melalui Aplikasi Akuntansi *database*, yang dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang ada dalam Laporan Realisasi APBD, terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja, Bantuan Sosial, Hibah, dan Pembiayaan.

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ternate. Tahun 2010 masih kurang memadai. Hal ini diketahui bahwa hanya 80% satker telah membuat laporan keuangan melalui program ini. Dan 20% belum bisa membuat karena keterbatasan Sumber Daya Manusia, sehingga untuk satker yang belum bisa, penyusunan laporan keuangannya dilakukan terpusat di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui bimbingan dari Seksi Akuntansi DPPKAD Kota Ternate. Selanjutnya untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate maka dilakukan kompilasi atas seluruh laporan keuangan satker yang ada pada lingkungan Pemerintah Kota Ternate.

SKPD yang Menyusun Laporan Keuangan Tidak Menggunakan Program

NO.	URAIAN
1	Badan Lingkungan Hidup
2	Sekretariat Daerah
3	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
4	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5	Kecamatan Pulau Batang Dua
6	Kecamatan Pulau Hiri
7	Kecamatan Moti

SKPD yang Menyusun Laporan Keuangan dengan Menggunakan Program

NO.	URAIAN
1	Dinas Pendidikan Nasional
2	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
3	Dinas Kesehatan
4	Kantor Pemadam Kebakaran
5	Dinas Tata Kota dan Pertamanan
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7	Dinas Perhubungan
8	Dinas Kebersihan
9	Kantor Pemberdayaan Perempuan
10	Kantor Keluarga Berencana
11	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
12	Dinas Koperasi dan Usah Kecil Menengah
13	Dinas Pemuda dan Olah Raga
14	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

15	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
16	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
17	Sekretariat DPRD
18	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
19	I n s p e k t o r a t
20	Kecamatan Kota Ternate Utara
21	Kecamatan Kota Ternate Selatan
22	Kecamatan Pulau Ternate
23	Kecamatan Kota Ternate Tengah
24	Badan Penanggulangan Bencana Alam
25	Badan Kepegawaian Daerah
26	Badan Pemberdayaan Masyarakat
27	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
28	Kantor Komunikasi dan Informatika
29	Dinas Pertanian dan Kehutanan
30	Balai Informasi & Penyuluhan Pertanian
31	Dinas Kelautan dan Perikanan
32	Dinas Pasar
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Untuk menghasilkan Laporan Barang Milik Daerah dilakukan secara manual menggunakan program *Excel* yang menyajikan posisi Barang Milik Daerah (BMD) pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMD yang terjadi selama periode tersebut.

2.2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima entitas pelaporan. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Sebagaimana kita ketahui untuk menjaga kelangsungan pembangunan di daerah, maka faktor yang sangat penting adalah tersedianya sumber-sumber pendapatan daerah yang memadai. Oleh karena itu segala upaya ditempuh oleh daerah dalam rangka meningkatkan sumber-sumber pendapatan di daerah, antara lain meliputi:

1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Adapun salah satu kebijakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah pada tahun 2010 adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, yang meliputi antara lain:

a. Kegiatan Intensifikasi

1. Pendataan : adalah mendata obyek-obyek pajak dan retribusi baru yang belum didata dengan tujuan untuk memperluas dan menambah potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Pendaftaran : adalah mendaftar obyek-obyek pajak dan retribusi baru dengan tujuan untuk menerbitkan NPWPD, agar dapat mengetahui secara konkrit jumlah potensi pajak dan retribusi daerah.
3. Penetapan : adalah mengadakan perhitungan dan menetapkan besaran nilai pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penagihan : adalah mengadakan penagihan kepada semua wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang sudah terdaftar.

b. Kegiatan Ekstensifikasi

1. Membuat peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.
2. Melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi.
3. Melakukan kegiatan pengkajian atau survei ke daerah yang lebih maju dengan karakteristik yang hampir sama dengan Kota Ternate, untuk dapat mengetahui kemungkinan adanya sumber-sumber pendapatan daerah yang lain.
4. Mengikutsertakan aparat pengelola pendapatan dalam kegiatan seminar dan workshop, baik pada tingkat lokal maupun nasional dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang pendapatan.

Permasalahan Dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi di bidang pendapatan dalam tahun 2010, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Permasalahan

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi atas kewajibannya terhadap daerah.
2. Kurangnya koordinasi dinas-dinas pengelola pendapatan asli daerah.
3. Kurangnya kualitas petugas (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
4. Kurangnya fasilitas dan sarana pendukung (kendaraan) dalam pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah.
5. Kurangnya pengawasan secara langsung oleh Pemerintah Kota Ternate, dalam hal ini PPNS terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak mematuhi Perda.

b. Solusi

1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dengan melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib

retribusi secara intens, serta menegakkan dan menerapkan sanksi yang tegas (sesuai ketentuan) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang sengaja melalaikan kewajibannya.

2. Perlunya koordinasi yang intensif bagi dinas-dinas pengelola pendapatan asli daerah.
3. Meningkatkan kualitas petugas (SDM) dengan mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan seminar, workshop dan lokakarya yang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah, melakukan sosialisasi, pembekalan dan penyuluhan tentang peraturan daerah dan aturan-aturan yang berlaku kepada petugas secara berkala.
4. Menyediakan fasilitas dan sarana pendukung (kendaraan) untuk kelancaran kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan pengawasan dari PPNS terhadap pelanggaran Perda oleh wajib pajak dan wajib retribusi.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Mengacu pada Visi dan Misi Kota Ternate dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate tahun 2005-2010, maka indikator pencapaian target kinerja APBD 2010 meliputi :

1. Strategi Program Pembangunan Ternate Sebagai Kota Budaya

Arah dan tujuan dimaksud meliputi :

- a. Memelihara, membina dan mendorong tumbuh dan berkembangnya hubungan sosial sesama warga masyarakat sebagai hasil interaksi antara nilai-nilai budaya, tradisi dan nilai keagamaan dalam suasana kekeluargaan dan persaudaraan.
- b. Terwujudnya keterpaduan sarana dan prasarana kawasan perkotaan sebagai suatu kesatuan ekosistem lingkungan alam, lingkungan sosial budaya dan lingkungan buatan dengan mengutamakan peran serta masyarakat.
- c. Mendukung pelestarian warisan budaya dan sejarah serta unsur-unsur yang menjadi pembentuk jati diri kota.
- d. Memacu produktifitas ekonomi perkotaan melalui penciptaan unsur-unsur budaya yang memiliki daya saing.

2. Strategi Program Pembangunan Ternate Sebagai Kota Perdagangan dan Wisata

Arah dan tujuan dimaksud meliputi:

- a. Mempersiapkan dan menyediakan lahan perkotaan dengan berbagai fasilitas jasa perdagangan dan wisata yang memungkinkan tumbuhnya ekonomi kota.
- b. Meningkatkan infrastruktur perkotaan (sarana dan prasarana) sehingga mampu mendorong dan memperlancar arus barang dan jasa serta angkutan manusia.
- c. Memperluas jangkauan pasar produk dalam negeri dan ekspor dengan jalan meningkatkan daya saing produksi melalui peningkatan efisiensi, kualitas dan diversifikasi produk.
- d. Mendorong dan membantu pengembangan industri kecil, koperasi, usaha rumah tangga serta usaha informal dalam rangka penguatan potensi ekonomi lokal.

- e. Memacu peran serta aktif masyarakat untuk mendorong perkembangan kepariwisataan yang diarahkan pada wisata sejarah, budaya, agro wisata dan maritim.

3. Strategi Program Pembangunan Ternate Sebagai Kota Pantai

Arah dan tujuan dimaksud meliputi:

- a. Pengembangan Kota Ternate dalam suatu sistem wilayah kepulauan, yang terdiri dari: sub sistem ruang daratan, sub sistem ruang pesisir dan sub sistem perairan/lautan, sebagai upaya peningkatan peran dan fungsi Kota Ternate sebagai Kota Pantai dalam suatu sistem wilayah kepulauan.
- b. Mengintegrasikan pola pembangunan infrastruktur perkotaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan kepulauan.
- c. Terciptanya kawasan pesisir pantai yang tertata, indah, bersih dan sehat dan dapat dimanfaatkan secara ekonomis melalui penataan kawasan pantai, terutama dengan membangun sarana dan prasarana sektor jasa dan perdagangan yang representatif.

4. Prioritas Daerah

Sebagai penjabaran dari strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan dengan memperhatikan permasalahan khas perkotaan dan kondisi obyektif, maka program prioritas daerah tahun 2009 mengacu pada Panca Program Pembangunan Kota Ternate 2005-2010, sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik.
- b. Peningkatan Kualitas SDM dan Kualitas Keberagamaan.
- c. Peningkatan Produktifitas Ekonomi Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
- d. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Pengembangan Kawasan Strategis.
- e. Perencanaan dan Pembangunan Kota Baru.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Target Dan Realisasi Pendapatan

Adapun target pendapatan daerah Kota Ternate tahun 2010 sebesar Rp465.502.127.800,00 dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp458.814.437.921,00 atau 98,56% dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Adapun target Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate pada tahun 2010 sebesar Rp26.905.000.000,00 dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp21.442.993.424,00 atau 79,70%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Adapun target pajak daerah pada tahun 2010 sebesar Rp8.800.000.000,00 dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp8.187.014.548,00 atau 93,03%.

2. Retribusi Daerah

Adapun target retribusi daerah pada tahun 2010 sebesar Rp11.855.000.000,00 dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp9.847.526.379,00 atau 83,07%.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Adapun target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2010 sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp304.761.759,00 atau 101,59%.

4. Lain-lain PAD Yang Sah

Adapun target lain-lain PAD yang sah pada tahun 2010 sebesar Rp5.950.000.000,00 dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp3.103.690.738,00 atau 52,16%.

b. Dana Perimbangan

Adapun target Dana Perimbangan pada tahun 2010 sebesar Rp359.343.668.000,00 dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp362.346.090.819,00 atau 100,84%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak

Adapun target bagi hasil pajak pada tahun 2010 sebesar Rp42.028.000.000,00 dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp49.407.571.701,00 atau 117,56%.

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Adapun target bagi hasil sumber daya alam pada tahun 2010 sebesar Rp11.377.000.000,00 dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp6.999.851.118,00 atau 61,53%.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Adapun target dana alokasi umum pada tahun 2010 sebesar Rp281.284.868.000,00 dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp281.284.868.000,00 atau 100%.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Adapun target dana alokasi khusus pada tahun 2010 sebesar Rp24.653.800.000,00 dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp24.653.800.000,00 atau 100%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah

Adapun target Lain-lain Pendapatan Daerah pada tahun 2010 sebesar Rp79.253.459.800,00 dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai sebesar Rp75.025.389.678,00 atau 94,67%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak Provinsi

Adapun target bagi hasil pajak provinsi pada tahun 2010 sebesar Rp12.877.000.000,00 dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp10.862.834.343,00 atau 84,36%.

2. Dana Penyesuaian

Adapun target dana penyesuaian pada tahun 2010 adalah sebesar Rp45.569.787.800,00 dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp43.866.312.800,00 atau 96,26%.

3. Penerimaan Lainnya

Adapun target penerimaan lainnya pada tahun 2010 sebesar Rp20.806.672.000,00 dan realisasi hingga akhir tahun dapat mencapai Rp20.296.242.535,00 atau 97,55%.

Permasalahan Dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi di bidang pendapatan dalam tahun 2010, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Permasalahan

1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi atas kewajibannya terhadap daerah.
2. Kurangnya koordinasi dinas-dinas pengelola pendapatan asli daerah.
3. Kurangnya kualitas petugas (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
4. Kurangnya fasilitas dan sarana pendukung (kendaraan) dalam pelaksanaan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah.
5. Kurangnya pengawasan secara langsung oleh Pemerintah Kota Ternate, dalam hal ini PPNS terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak mematuhi Perda.

b. Solusi

1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dengan melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi secara intens, serta menegakkan dan menerapkan sanksi yang tegas (sesuai ketentuan) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang sengaja melalaikan kewajibannya.
2. Perlunya koordinasi yang intensif bagi dinas-dinas pengelola pendapatan asli daerah.
3. Meningkatkan kualitas petugas (SDM) dengan mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan seminar, workshop dan lokakarya yang terkait dengan peningkatan pendapatan daerah, melakukan sosialisasi, pembekalan dan penyuluhan tentang peraturan daerah dan aturan-aturan yang berlaku kepada petugas secara berkala
4. Menyediakan fasilitas dan sarana pendukung (kendaraan) untuk kelancaran kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah.
5. Meningkatkan pengawasan dari PPNS terhadap pelanggaran Perda oleh wajib pajak dan wajib retribusi.

3.1.2 Target Dan Realisasi Belanja

Adapun anggaran belanja dalam APBD Kota Ternate tahun 2010 sebesar Rp488.170.772.768,00. Realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp454.843.014.632,00 atau 93,17% dari total anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Adapun belanja pegawai dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp283.297.711.411,00. Realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp259.647.323.399,00 atau 91,65% dari total anggaran.

b. Belanja Barang dan Jasa

Adapun belanja barang dan Jasa dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp82.742.596.619,00. Realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp75.010.001.747,00 atau 90,65% dari total anggaran.

c. Belanja Hibah

Adapun belanja hibah dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp12.775.000.000,00. Realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp12.770.343.188,00 atau 99,96% dari total anggaran.

d. Bantuan Sosial

Adapun belanja bantuan sosial dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp6.198.875.000,00. Realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp6.176.444.660,00 atau 99,64% dari total anggaran.

e. Belanja Modal

Adapun belanja modal dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp101.856.589.738,00. Realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp100.569.236.838,00 atau 98,74% dari total anggaran.

f. Belanja Tidak Terduga

Adapun belanja tidak terduga dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi belanja hingga akhir tahun sebesar Rp669.664.800,00 atau 66,97% dari total anggaran.

g. Belanja Bunga

Adapun belanja bunga dalam APBD tahun 2010 sebesar Rp300.000.000,00. Anggaran tersebut tidak terealisasi hingga akhir tahun.

Permasalahan Dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi di bidang belanja daerah dalam tahun 2010, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Permasalahan

1. Kebijakan regulasi yang begitu cepat menyebabkan masih adanya sebagian komponen belanja belum dapat disesuaikan dengan pedoman yang baru.
2. Tuntutan dan kebutuhan alokasi belanja dari masing-masing satuan kerja belum dapat dipenuhi secara optimal.
3. Sebagian komponen belanja yang terdapat pada standar belanja (*check price*) tidak sesuai dengan harga pasar yang cenderung fluktuatif.

b. Solusi

1. Perlu sosialisasi lebih lanjut terhadap kebijakan regulasi pengelolaan belanja sesuai pedoman yang baru.
2. Peningkatan sumber-sumber pendapatan agar secara bertahap dapat dipenuhi kebutuhan belanja dari satuan kerja.
3. Perlu mengsinkronkan standar belanja (*check price*) dalam penyusunan RKA-SKPD dengan mengantisipasi kemungkinan harga pasar yang cenderung fluktuatif.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan untuk Pemerintah Kota Ternate dilaksanakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah.

Entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran dan Bendahara Umum Daerah yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan disusun secara *double entries* atas seluruh pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran pengakuan atas pendapatan dan belanja atas dasar kas (*cash basis*) dimana pendapatan diakui pada saat dibukukan pada Kas Daerah, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah. Penilaian terhadap aset atas dasar *accrual basis*, yaitu pengakuan terhadap harta diakui pada mendapatkan manfaat. Dalam laporan keuangan ini angka-angka disajikan sampai dengan dua digit di belakang koma.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis.
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut.
5. Pengukuran laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, kas di pemegang kas, simpanan pada bank, piutang lain-lain dan persediaan.

a. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas di Kas Daerah, kas di Bendahara Penerimaan dan kas di Bendahara Pengeluaran. Setara kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 bulan dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan. Kas diukur dicatat sebesar nilai nominal.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek terdiri dari deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 bulan, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia(SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Investasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan.

c. Piutang

Piutang adalah jumlah yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat atau perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu besar nilai piutang yang belum dilunasi.

d. Persediaan

Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan disajikan sebesar nilai perolehan.

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimiliki dan diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

a. Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi terdiri dari bantuan modal dalam bentuk dana bergulir.

b. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari:

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah/ekuitas kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, dan badan usaha lainnya milik negara.
 - 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga.
 - 3) Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.
3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan yang dikuasai. Aset terdiri dari tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Batas pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap adalah yang harga perolehan per unitnya 1 Juta rupiah. Sehingga neraca tahun 2010 telah dilakukan kapitalisir. Batasan jumlah biaya untuk pemeliharaan, penambahan, penggantian dan perbaikan aset tetap adalah sebesar 5% dari nilai harga perolehan sebagai penambahan nilai aset tetap. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal.
 - c. Biaya-biaya bersama non fisik dalam rangka memperoleh beberapa aset tetap yang harusnya menambah kapitalisasi masing-masing aset tetap belum diatur dalam kebijakan akuntansi bagaimana teknik pengatribusiannya namun pemerintah kota ternate melakukan atribusi secara proporsional berdasarkan besaran jumlah belanja modal masing-masing kegiatan mengingat biaya-biaya tersebut memang seharusnya dikapitalisasi menambah aset-aset yang bersangkutan.
4. Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen/non permanen dan aset tetap. Aset lainnya terdiri dari tagihan penjualan angsuran, kemitraan dengan pihak ketiga, dana cadangan dan lain-lain aset.

5. Akuntansi Hutang Jangka Pendek

Hutang jangka pendek merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 1 (satu) periode akuntansi. Hutang jangka pendek terdiri dari bagian lancar hutang luar negeri, bagian lancar hutang kepada pemerintah pusat, bagian lancar hutang kepada pemerintah daerah otonomi lainnya, bagian lancar hutang kepada BUMN/BUMD, bagian lancar hutang kepada bank/lembaga keuangan, hutang biaya pinjaman (denda, biaya administrasi dan lain-lain) dan hutang atas Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).

6. Akuntansi Hutang Jangka Panjang dan Hutang Bunga

Hutang jangka panjang merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Hutang jangka panjang terdiri dari:

- a. Hutang Luar Negeri,
- b. Hutang Kepada Pemerintah Pusat,
- c. Hutang kepada Pemerintah Daerah Otonomi Lainnya, Hutang kepada BUMN/BUMD,
- d. Hutang kepada Bank/Lembaga Keuangan,
- e. Hutang Dalam Negeri Lainnya, dan
- f. Hutang Bunga.

7. Akuntansi Ekuitas Dana Umum

Mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana yang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran penilaian dan pengungkapan ekuitas dana. Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang.

8. Pengakuan Pendapatan dan Belanja

Seluruh pendapatan diakui pada saat diterima dan telah dibukukan pada Kas Daerah, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah dan telah diotorisasikan melalui pengesahan pihak yang berwenang.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Adapun hal-hal yang belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu:

- Aset tetap belum dilakukan penyusutan,
- Aset Pemerintah Kota Ternate menggunakan nilai perolehan dan akan dilakukan penilaian terhadap seluruh aset Pemerintah Kota Ternate pada tahun anggaran 2011, dan
- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya belum dilaksanakan dengan baik dan benar, karena terbentur masalah sumber daya manusia/aparaturnya yang masih belum memadai.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, yang terdiri dari:

1.1 Aset Lancar Sebesar Rp15.950.812.116,00

Meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan

	2010 (Rp)	2009 (Rp)
Kas	7.085.892.087,00	3.095.473.411,00

Kas adalah uang tunai dan dana yang disimpan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Saldo Kas per 31 Desember 2010 sebesar Rp7.085.892.087,00.

Rincian Kas adalah sebagai berikut:

	2010 (Rp)	2009 (Rp)
1.1.1. Kas di Kasda :	6.730.455.459,00	2.708.431.415,00

Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2010 berasal dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo awal 1 Januari 2010	2.412.293.587,00
2	Kas Bersih Periode Januari s/d 31 Desember 2010	4.318.161.872,00
	Saldo Akhir 31 Desember 2010	6.730.455.459,00

Perubahan saldo awal Kas Daerah dari saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.708.431.415,00 menjadi sebesar Rp2.412.293.587,00 disebabkan adanya koreksi pembukuan atas masih dicatatnya penerbitan SP2D kepada rekanan sebesar Rp296.137.828,00 namun baru dicairkan Bulan Januari 2010. Atas kejadian tersebut, sudah dicatat sebagai realisasi belanja tahun 2009 namun belum dikurangkan dari saldo Kas di Kasda sebesar Rp296.137.828,00. Untuk itu dilakukan koreksi atas saldo awal Kas Daerah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo akhir 31 Desember 2009 berdasarkan LKPD 2009	2.708.431.415,00
2	SP2D kepada rekanan yang belum dicairkan per 31 Desember 2009	(296.137.828,00)
	Saldo Awal Kas di BUD 1 Januari 2010	2.412.293.587,00

Saldo Kas Daerah di BUD sebesar Rp6.730.455.459,00, sedangkan saldo kas di rekening Bank BUD milik Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp6.777.463.395,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp47.007.936,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bank Pemb.Maluku No. Rek 0601022001	587.911.758,00
2	BPD No.Rek Hibah 0601002014	1.142.831,00
3	BNI No. Rek 0086130053	6.188.408.806,00
	Jumlah	6.777.463.395,00
	Saldo Akhir Kas Daerah menurut Catatan	6.730.455.459,00
	Selisih	47.007.936,00

Selisih saldo sebesar Rp47.007.936,00 tersebut berasal dari SP2D yang telah diterbitkan namun belum dicairkan s.d. 31 Desember 2010 dan telah dicatat sebagai belanja tahun 2010 sebesar Rp47.006.924,00 ditambah pembulatan transaksi bank sebesar Rp1.012,00.

Saldo Kas Daerah di BUD sebesar Rp6.730.455.459,00 terdiri atas Utang Perhitungan Pihak Ketiga yang sampai dengan 31 Desember 2010 belum dibayarkan sebesar Rp244.930.037,00 dan SiLPA yang terdapat di Kas Daerah sebesar Rp6.485.525.422,00.

		2010 (Rp)	2009 (Rp)
1.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran:	355.436.628,00	387.041.996,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih berada di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2010 sebesar Rp355.436.628,00.

Terdapat perubahan saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.256.722,00 yang berasal dari adanya uang milik daerah yang belum disajikan sebagai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran di akhir tahun 2009 sebesar Rp2.256.722,00, sehingga saldo awal tahun 2010 bertambah menjadi sebesar Rp389.298.718,00 dari sebesar Rp387.041.996,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp355.436.628,00.

terdiri dari:

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	10.952.227,00
2	Sanggar Kegiatan belajar	1.000.164,00
3	Kesehatan	11.580.864,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	9.325.698,00
5	Kantor Pemadam Kebakaran	1.021.722,00
6	Dinas Tata Kota	1.031.323,00
7	BAPPEDA	1.555.105,00
8	Dinas Perhubungan	239.837,00
9	Dinas Kebersihan	3.397.715,00

No.	SKPD	Nilai (Rp)
10	Badan Lingkungan Hidup	281.899,00
11	Dinas Catatan Sipil	1.408.437,00
12	Kantor Pemberdayaan Perempuan	1.518.229,00
13	Kantor Keluarga Berencana	16.375.455,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	9.209.254,00
15	Dinas Koperasi dan UKM	1.049.473,00
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.002.203,00
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.168.306,00
18	Kantor satuan Polisi pamong Praja	3.522.289,00
19	Badan Kesbang Linmas	23.612.650,00
20	Sekretariat Daerah	8.164.318,00
21	Sekretariat Dewan	1.134.357,00
22	DPPKAD	1.000.000,00
23	Inspektorat	1.000.064,00
24	Kec. Ternate Utara	999.330,00
25	Kec. Ternate Selatan	64.513.974,00
26	Kec. Pulau Ternate	3.444.663,00
27	Kec. MOTI	1.247.837,00
28	Kec. Ternate Tengah	3.718.858,00
29	Kec. Batang Dua	1.330.222,00
30	Kec. HIRI	1.000.003,00
31	BPBD	33.656.500,00
32	Badan Kepegawaian Daerah	1.335.000,00
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat	3.107.027,00
34	Kantor ARSIP	1.577.310,00
35	Kantor INFOKOM	43.794.173,00
36	Dinas Pertanian	995.755,00
37	BP4K	1.532.191,00
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	80.237.331,00
39	Dinas Pasar	1.081.952,00
40	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.312.913,00
	Jumlah	355.436.628,00

Atas saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 sebesar Rp355.436.628,00 tersebut diketahui bahwa sebesar Rp47.856.008,00 berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran Kecamatan Ternate Selatan yang lama (sebelum penugasan Bendahara Pengeluaran baru tanggal 22 September 2010).

	2010 (Rp)	2009 (Rp)
1.1.3. Piutang Pajak	4.537.461.915,00	341.146.822,00

Piutang Pajak merupakan hak Pemerintah Kota Ternate atas Pajak Daerah yang belum diterima pembayarannya per 31 Desember 2010 sebesar Rp4.537.461.915,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pajak Hotel	97.412.615,00
2	Pajak Restoran	102.268.044,00
3	Pajak Reklame	3.292.500,00
4	Pajak Penerangan Jalan	2.371.059.040,00
5	Pajak Galian Gol C	1.963.429.716,00
	Jumlah	4.537.461.915,00

	2010 (Rp)	2009 (Rp)
1.1.4. Piutang Retribusi	59.922.100,00	168.429.071,00

Piutang Retribusi sebesar Rp59.922.100,00 adalah hak Pemerintah Kota Ternate atas penerimaan retribusi ayam petelur yang belum diterima pembayarannya per 31 Desember 2010.

	2010 (Rp)	2009 (Rp)
1.1.5. Piutang Dana Bagi Hasil	937.216.883,00	3.667.259.657,00

Piutang Dana Bagi Hasil merupakan Dana Bagi Hasil Pusat milik Pemerintah Kota Ternate yang belum diterima di Kas Daerah per 31 Desember 2010 sebesar Rp937.216.883,00 yang terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	BP-PBB	579.656.993,00
2	PPh Pasal 21	357.559.890,00
	Jumlah	937.216.883,00

Piutang sebesar Rp937.216.883,00 disajikan berdasarkan data Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Alokasi Defenitif Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Pemerintah Kota Ternate.

	2010 (Rp)	2009 (Rp)
1.1.6. Piutang Lain-lain Pendapatan Daerah	1.301.282.831,00	0,00

Piutang lain – lain pendapatan daerah yang dicantumkan ke dalam Neraca Daerah per 31 Desember 2010 adalah hak bagi hasil pajak provinsi yang belum diterima oleh Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember sebesar Rp1.301.282.831,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Nilai (Rp)	Nomor Surat	Tanggal
1	PKB Triwulan II	349.694.515,00	973/167/DPPAD	17-Sep-10
2	BBN KB Triwulan II	286.134.016,00	973/167/DPPAD	17-Sep-10
3	PKB Triwulan III	328.005.578,00	973/230/DPPAD	20-Dec-10
4	BBN KB Triwulan III	337.448.722,00	973/230/DPPAD	20-Dec-10
	Jumlah	1.301.282.831,00		

Selain saldo piutang sebesar Rp1.301.282.831,00 tersebut masih terdapat piutang Pemerintah Kota Ternate atas hak bagi hasil pajak provinsi Tahun 2010 yang belum disajikan di neraca sebesar Rp2.678.032.507,00 karena daftar pembagiannya baru diterbitkan Tahun 2011 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Nilai (Rp)	Nomor Surat	Tanggal
1	PBB KB Triwulan IV	1.940.423.606,00	973/236/DPPAD	05-Jan-11
2	P3ABT-AP	30.751.440,00	973/235/DPPAD	05-Jan-11
3	PKB Triwulan IV	398.345.745,00	973/273/DPPAD	07-Feb-11
4	BBN KB Triwulan IV	308.511.716,00	973/273/DPPAD	07-Feb-11
	Jumlah	2.678.032.507,00		

	2010 (Rp)	2009 (Rp)
1.1.7. Persediaan	2.029.036.300,00	1.882.520.040,00

Persediaan merupakan barang pakai habis/material barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi yang terdiri dari persediaan barang pakai habis/material yang meliputi obat-obatan, Alat Tulis Kantor (ATK), barang cetakan, alat listrik, lain-lain, dan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai dan diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.

Persediaan yang dicantumkan ke dalam Neraca daerah per 31 Desember 2010 didasarkan data persediaan menurut SKPD yaitu sebesar **Rp2.029.036.300,00** terdiri dari:

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.390.377.101,00
2	Dinas Tata Kota	3.319.344,00
3	BAPPEDA	237.000,00
4	Dinas Kebersihan	705.000,00
5	Badan Lingkungan Hidup	(68.000,00)
6	Dinas Catatan Sipil	170.220.000,00
7	Dinas Tenaga dan Sosial	324.100,00
8	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	162.100,00
9	Badan Kesbang Linmas	180.000,00
10	Sekretariat DPRD	1.454.500,00
11	DPPKAD	460.272.655,00
12	Inspektorat	1.530.000,00
13	Kac. Pulau Ternate	95.000,00
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	227.500,00
	Jumlah	2.029.036.300,00

Nilai persediaan tersebut termasuk persediaan pada DPPKAD yang dicatat tidak berdasarkan hasil inventarisasi fisik akhir tahun dan tidak dinilai berdasarkan harga perolehan sebesar Rp460.272.655,00.

Nilai persediaan tersebut tidak termasuk nilai persediaan Dinas Perhubungan yang tidak dilaporkan dan tidak diketahui nilai perolehannya sebanyak 6.442 buku karcis.

1.2 Investasi Jangka Panjang Sebesar Rp10.738.272.265,43

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara (SUN), penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate dan investasi permanen lainnya. Saldo Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2010 sebesar Rp10.738.272.265,43 terdiri dari:

	2010 (Rp)	2009 (Rp)
1.2.1. Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir)	3.106.000.000,00	3.106.000.000,00

Dana bergulir adalah pengeluaran pembiayaan berupa investasi dalam bentuk dana bergulir dengan penanggung jawab Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate yang disalurkan kepada kelompok masyarakat dan akan digulirkan kepada kelompok masyarakat lainnya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Rp3.106.000.000,00 dengan rincian investasi berdasarkan tahun investasi adalah sebagai berikut:

Tahun Dana	Realisasi (Rp)
2002	435.900.000,00
2003	727.500.000,00
2004	487.600.000,00
2005	365.000.000,00
2006	400.000.000,00
2008	300.000.000,00
2009	390.000.000,00
2010	-
Jumlah	3.106.000.000,00

Adapun rincian jumlah dana bergulir berdasarkan pengelola yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Ternate adalah sebagai berikut:

Pengelola Dana Bergulir	Nilai (Rp)
BRI	435.900.000,00
Koperasi Makugawene	2.470.100.000,00
Dana Bergulir pada PKK	150.000.000,00
Dana Bergulir pada LEPM3	30.000.000,00
Dana Bergulir pada ISSAP	20.000.000,00
Jumlah	3.106.000.000,00

Nilai investasi non permanen tersebut dicatat tidak berdasarkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan disebabkan tidak tersedianya laporan monitoring atas pengembalian dana bergulir sebesar Rp3.106.000.000,00 tersebut dan kebijakan umur piutang belum ditetapkan oleh pengelola dana bergulir.

	2010 (Rp)	2009 (Rp)
1.2.2. Investasi Permanen	7.632.272.265,43	7.632.272.265,43

Investasi permanen Pemerintah Kota Ternate didasarkan penyertaan saham maupun konversi pemanfaatan aset Pemerintah Kota Ternate yang dipisahkan pengurusannya kepada Perusahaan Daerah maupun perusahaan lainnya. Konversi nilai semua aset Pemerintah Kota Ternate yang diserahkan pengelolaannya kepada Perusahaan Daerah diperhitungkan sebagai penambah penyertaan modal Pemerintah Kota Ternate dan dibukukan sebesar nilai perolehan/nilai yang wajar.

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2010 sebesar **Rp7.632.272.265,43** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	PT. Bank BPD Maluku 2005 – 2009	2.000.000.000,00
2	PD. Citra Gamalama 2005 – 2009	1.650.000.000,00
3	PDAM / 31 Des 2009 (laba)	3.982.272.265,43
	Jumlah	7.632.272.265,43

Investasi berupa penyertaan modal kepada PT Bank Maluku terdiri atas 400 lembar saham PT Bank Maluku (No. A. BM. 0016501 s.d. 0016900) dengan rincian tahun penyertaan modal sebagai berikut:

No.	Pengelola Dana Bergulir	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2005	500.000.000,00
2	Penambahan Tahun 2006	500.000.000,00
3	Penambahan Tahun 2007	500.000.000,00
4	Penambahan Tahun 2009	500.000.000,00
	Total	2.000.000.000,00

Investasi berupa penyertaan modal kepada PD Citra Gamalama sebesar Rp1.650.000.000,00 terdiri atas investasi pada tahun – tahun sebagai berikut:

No.	Pengelola Dana Bergulir	Nilai (Rp)
1	Saldo per 31 Desember 2005	750.000.000,00
2	Penambahan 2006	250.000.000,00
3	Penambahan 2008	500.000.000,00
4	Penambahan 2009	150.000.000,00
	Jumlah	1.650.000.000,00

Penyertaan modal PD Citra Gamalama sebesar Rp1.650.000.000,00 dicatat berdasarkan metode harga perolehan. Dari jumlah tersebut Rp50.000.000,00 merupakan titipan pembayaran dari Pemerintah Kota Ternate untuk pembayaran biaya sewa lahan bandara, sehingga nilai penyertaan modal hanya sebesar Rp1.600.000.000,00.

Penyertaan modal pada PD Citra Gamalama senilai Rp1.600.000.000,00 dicatat dengan metode harga perolehan dan tidak didasarkan laporan keuangan PD Citra Gamalama tahun 2010 yang telah diaudit.

Penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp3.982.272.265,43 dicatat sebesar laba tahun 2009 yang dimuat dalam laporan keuangan PDAM Tahun 2009.

	2010 (Rp)	2009 (Rp)
1.3. Aset Tetap	941.595.674.146,57	805.439.340.041,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap sebesar **Rp941.595.674.146,57** terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Tanah	39.046.622.794,00
Peralatan dan Mesin	129.047.654.055,38
Gedung dan Bangunan	304.752.765.020,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	378.435.177.808,71
Aset Tetap Lainnya	14.057.208.468,48
Konstruksi Dalam Pengerjaan	76.256.246.000,00
Jumlah	941.595.674.146,57

Atas saldo aset tetap sebesar Rp941.595.674.146,57 tersebut diketahui beberapa hal:

- Saldo aset tetap per 31 Desember 2009 (*audited*) sebesar Rp805.439.340.041,00, sedangkan saldo awal yang digunakan dalam pencatatan aset tetap tahun 2010 sebesar Rp805.542.510.488,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp103.170.447,00. Atas selisih tersebut tidak dapat dijelaskan.
- Realisasi belanja modal tahun 2010 sebesar Rp100.569.236.838,00 sedangkan kenaikan Aset Tetap sebesar Rp102.333.026.136,24 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.763.789.298,24. Atas selisih tersebut tidak dapat dijelaskan.
- Daftar aset tetap tidak menjelaskan tentang aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp26.597.514.367,00.
- Laporan aset tetap berisi aset rusak sebesar Rp8.898.435.089,00 namun tidak memuat rincian jenis aset yang rusak berat dan belum diverifikasi oleh Tim Penghapusan Aset.
- Terdapat aset tetap Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp5.948.631.100,00 yang telah diserahkan ke PDAM Kota Ternate namun tidak didukung dengan rincian aset tetap yang diserahkan.
- Aset tetap sebanyak 89 bidang tanah dan 41 unit kendaraan masing-masing dinilai Rp1,00.
- Aset tanah sebanyak 9 bidang seluas 40.220 m² senilai Rp6,00 masih atas nama pribadi dan instansi lain di luar Pemerintah Kota Ternate.
- Aset kendaraan senilai Rp3.880.672.967,00 dikuasai mantan pejabat dan mantan anggota dewan.
- Terdapat 19 bidang tanah dan bangunan senilai Rp7.277.092.370,00 yang direncanakan untuk diserahkan oleh Kabupaten Halmahera Barat kepada Pemerintah Kota Ternate belum didukung Berita Acara Serah Terima dan telah disajikan sebagai aset tetap senilai Rp19,00.

	2010 (Rp)	2009 (Rp)
1.3.1. Tanah	39.046.622.794,00	36.191.425.751,00

Tanah merupakan nilai Tanah per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
36.191.425.750,00	2.945.197.044,00	90.000.000,00	39.046.622.794,00

Penambahan aset tetap tanah sebesar Rp2.945.197.044,00 berasal dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Modal tahun 2010	2.753.200.000,00
Kesalahan pencatatan tahun 2009:	
- Sekretariat Daerah	115.980.000,00
- Bantuan dari BKKBN Pusat	16.000.000,00
- Belanja APBD TK II pada Dinas Kebersihan	60.000.000,00
- Bantuan Pemda Kab.Maluku Utara kepada Kantor Camat Ternate Utara	17.000,00
- 44 bidang tanah dengan nilai masing-masing Rp1,00.	44,00
Jumlah	2.945.197.044,00

Pengurangan aset tetap tanah bersumber dari koreksi pencatatan tanah pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp90.000.000,00 karena bukan aset tanah tapi hanya timbunan tanah.

Nilai Tanah sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp39.046.622.794,00 adalah nilai tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate berupa tanah kosong/lapangan, tanah di bawah bangunan, tanah di bawah konstruksi jalan, tanah irigasi dan tanah darat sekitar daerah irigasi.

Nilai tanah ditetapkan berdasarkan harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak ditemukan maka digunakan nilai 1 (satu). Dari nilai tanah tersebut sebanyak 294 bidang tanah belum dilengkapi dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah, aset tanah yang bersertifikat sebanyak 53 bidang seluas 92,410 m². Dari nilai tersebut hanya 44 bidang tanah seluas 52.190 m² yang bersertifikat atas nama Pemerintah Kota Ternate, sedangkan 9 bidang tanah seluas 40.220 m² atas nama pribadi dan instansi lain di luar Pemerintah Kota Ternate.

Hak kepemilikan tanah berupa sertifikat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Bidang Tanah	Luas Tanah (m²)	Nilai (Rp)
Tanah yang telah memiliki sertifikat	53	92.410	8,00
Tanah yang belum memiliki Sertifikat	294	-	39.046.622.786,00
Jumlah	347	-	39.046.622.794,00

Proses sertifikasi tanah akan terus dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran.

Berdasarkan Daftar Hasil Validasi Bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan Pemerintah Kota Ternate dan hasil update penguasaan/pemanfaatan aset eks Kabupaten Halmahera Barat oleh Pemerintah Kota Ternate diketahui 1 (satu) bidang

tanah/bangunan sudah diserahkan ke PDAM Kota Ternate, dan 35 bidang tanah/bangunan disepakati/direncanakan untuk diserahkan kepada Pemerintah Kota Ternate. Dari 35 bidang tanah/bangunan yang disepakati/direncanakan untuk diserahkan kepada Pemerintah Kota Ternate terdiri dari:

- a. 19 bidang tanah/bangunan sudah dikuasai atau dimanfaatkan oleh SKPD-SKPD di Pemerintah Kota Ternate, dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD Pengguna	Alamat	Tanah		Bangunan		Jumlah (Rp)
			Luas (m ²)	Harga (Rp)	Luas (m ²)	Harga (Rp)	
1	Dinas Pendidikan (UPTD)	Jl. Maliaro	2.291,78	146.673.920,00	229,00	211.825.000,00	358.498.920,00
2	Dinas Pendidikan (UPTD)	Jl. Maliaro		-	168,00	155.400.000,00	155.400.000,00
3	Badan Lingkungan Hidup	Kalumata	789,00	64.698.000,00	306,00	206.147.500,00	270.845.500,00
4	Dinas Perhubungan	Jl. Monunutu	795,60	193.330.800,00	313,50	341.715.000,00	535.045.800,00
5	Dinas Kesehatan Kota	Jl. Akehuda	1.165,60	74.598.400,00	618,80	479.570.000,00	554.168.400,00
6	Badan Kepend. Capil & KB	Dufa-Dufa	1.625,00	133.250.000,00	310,20	248.160.000,00	381.410.000,00
7	Dinas NAKERSOS	Tanah Mesjid	575,75	47.211.500,00	220,00	104.500.000,00	151.711.500,00
8	DPPKD Kota Ternate	Stadion	1.500,00	300.000.000,00	419,78	241.373.500,00	541.373.500,00
9	Dinas P.U Kota Ternate	Jl. Siswa	1.369,50	175.296.000,00	255,70	34.519.500,00	209.815.500,00
10	Inspektorat Kota Ternate	Jati Perumnas	1.462,00	119.884.000,00	310,80	240.870.000,00	360.754.000,00
11	Rumah Potong Hewan Kota Tte.	Tafure	2.490,00	67.230.000,00	329,00	189.175.000,00	256.405.000,00
12	Dinas Pertanian Kota Ternate	Sasa	1.190,25	32.136.750,00	185,00	106.375.000,00	138.511.750,00
13	Dinas Pertanian Kota Ternate	Batu Anteru	832,00	68.224.000,00	230,50	132.537.500,00	200.761.500,00
14	BP4K	Kel. Ngidi	1.050,00	86.100.000,00	240,00	180.000.000,00	266.100.000,00
15	BP4K	Kel. Jati Perumnas	750,00	61.500.000,00	300,00	225.000.000,00	286.500.000,00
16	SKB Kota Ternate	Dufa-Dufa	4.125,00	338.250.000,00	1.200,00	1.125.000.000,00	1.463.250.000,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jln. Zainal Abd. Syah	954,75	152.760.000,00	314,00	294.060.000,00	446.820.000,00
18	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Maliaro	1.432,00	91.648.000,00	298,00	186.000.000,00	277.648.000,00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kayu Merah	672,00	43.008.000,00	342,00	379.065.000,00	422.073.000,00
				2.195.799.370,00		5.081.293.000,00	7.277.092.370,00

- b. 1 (satu) bidang tanah/bangunan sudah digunakan oleh Perusahaan Daerah Citra Gamalama;
- c. 10 (sepuluh) bidang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara; dan
- d. 5 (lima) bidang digunakan oleh instansi lain dan masyarakat.

Nilai dan daftar tanah pada Laporan Akhir Tahun Barang Milik Daerah belum termasuk aset tanah hasil reklamasi kawasan pantai Tapak II seluas 38.457 m² berlokasi di kelurahan Gamalama Kota Ternate sesuai keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 91/LHP/BPN/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Pemberian Hak Pengelolaan atas Nama Pemerintah Kota Ternate atas Tanah Terletak di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Atas tanah tersebut dilakukan kerjasama pemanfaatan dengan PT Jatiluhur Gemilang.

		2010 (Rp)	2009 (Rp)
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	129.047.654.055,38	113.646.457.701,00

Merupakan nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 sebesar Rp129.047.654.055,38. Dari jumlah tersebut, peralatan dan mesin senilai Rp8.893.020.089,00 dalam keadaan rusak berat dan senilai Rp18.363.739.165,00 tidak diketahui keberadaannya.

(1) Alat-alat Berat

Alat-alat Berat merupakan nilai Alat-alat Berat per 31 Desember 2010 sebesar Rp8.999.309.850,00 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
10.497.027.099,00	392.800.001,00	1.890.517.250,00	8.999.309.850,00

Penambahan nilai Alat-alat Berat senilai Rp392.800.001,00 terjadi pada Dinas Kebersihan.

Pengurangan nilai Alat-alat Berat terdiri dari:

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	15.000.000,00
2	Kantor Pemadam Kebakaran	260.945.000,00
3	Dinas Tata Kota dan Pertamanan	908.060.000,00
4	Badan Lingkungan Hidup	335.555.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	370.957.250,00
	Jumlah	1.890.517.250,00

(2) Alat-alat Angkutan

Alat-alat Angkutan merupakan nilai Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2010 sebesar Rp50.892.349.924,28 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
46.081.192.961,00	9.739.340.508,78	4.928.183.545,50	50.892.349.924,28

Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 unit kendaraan senilai Rp3.880.672.967,00 masih dikuasai mantan pejabat Kota Ternate dan Anggota DPRD Kota Ternate, dan aset kendaraan senilai Rp29.936.536.913,00 belum didukung bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

(3) Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat-alat Bengkel merupakan nilai Alat-alat Bengkel per 31 Desember 2010 sebesar Rp3.875.417.342,64 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
4.031.047.714,00	2.165.660.628,64	2.321.291.000,00	3.875.417.342,64

(4) Alat-alat Pertanian dan Peternakan

Alat-alat Pertanian dan Peternakan merupakan nilai Alat-alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2010 sebesar Rp1.088.775.908,00 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
1.866.060.453,00	181.772.000,00	959.056.545,00	1.088.775.908,00

(5) Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga merupakan nilai Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
32.112.984.985,00	10.479.598.485,34	1.063.599.561,09	41.528.983.909,25

(6) Alat Studio dan Komunikasi

Alat Studio dan Komunikasi merupakan nilai Alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
2.554.497.240,00	438.787.406,00	145.878.400,00	2.847.406.246,00

(7) Alat-alat Kedokteran

Alat-alat Kedokteran merupakan nilai Alat-alat Kedokteran per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
11.087.545.721,00	132.744.745,55	2.018.066.668,42	9.202.223.798,13

(8) Alat-alat Laboratorium

Alat-alat Laboratorium merupakan nilai Alat-alat Laboratorium per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
4.205.480.528,00	6.339.825.869,08	4.829.320,00	10.540.477.077,08

(9) Alat-alat Keamanan

Alat-alat Keamanan merupakan nilai Alat-alat Keamanan per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
43.710.000,00	29.000.000,00		72.710.000,00

		2010 (Rp)	2009 (Rp)
1.3.3.	Gedung Dan Bangunan	304.752.765.020,00	295.570.296.419,00

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp304.752.765.020,00 adalah gedung dan bangunan milik Pemerintah Kota Ternate yang sebagian besar berupa bangunan kantor dan sekolah, serta bangunan lainnya yang terdapat pada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dengan saldo per 31 Desember 2010 sebesar **Rp304.752.765.020,00**. Dari nilai tersebut senilai Rp2.330.000,00 dalam keadaan rusak berat dan Rp1.874.482.293,00 tidak diketahui keberadaannya.

(1) Bangunan Gedung

Bangunan Gedung merupakan nilai Bangunan Gedung per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
293.536.560.219,00	47.341.681.884,00	38.299.262.783,00	302.578.979.320,00

(2) Bangunan Monumen

Bangunan Monumen merupakan nilai Bangunan Gedung per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
2.173.785.700,00	0,00	0,00	2.173.785.700,00

		2010 (Rp)	2009 (Rp)
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	378.435.177.808,71	269.430.496.165,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp378.435.177.808,71 adalah nilai dari bangunan jalan, jembatan, gorong-gorong, trotoar, bangunan air dan saluran per 31 Desember 2010. Dari nilai tersebut senilai Rp3.085.000,00 dalam keadaan rusak berat dan senilai Rp3.879.769.000,00 tidak diketahui keberadaannya.

(1) Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan merupakan nilai Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
158.096.701.874,00	84.627.951.522,00	6.406.614.495,00	236.318.038.901,00

(2) Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air (Irigasi) merupakan nilai Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
74.651.213.213,00	33.229.008.280,71	4.277.256.766,00	103.602.964.727,71

(3) Instalasi

Instalasi merupakan nilai Instalasi per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
2.661.005.627,00	1,00	5.353.900,00	2.655.651.728,00

(4) Jaringan

Jaringan merupakan nilai Jaringan per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
32.458.300.451,00	7.292.822.101,00	3.892.600.100,00	35.858.522.452,00

1.3.5. Aset Tetap Lainnya	2010 (Rp)	2009 (Rp)
	14.057.208.468,48	12.562.142.675,00

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan per 31 Desember 2010 sebesar Rp14.057.208.468,48. Dari jumlah tersebut senilai Rp2.479.523.909,00 tidak diketahui keberadaannya.

(1) Buku dan Perpustakaan

Buku dan Perpustakaan merupakan nilai Buku dan Perpustakaan per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
9.763.448.766,00	1.651.603.081,48	15.300.000,00	11.399.751.847,48

(2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan merupakan nilai Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
524.086.000,00	54.092.000,00	286.086.000,00	292.092.000,00

(3) Hewan/Ternak dan Tumbuhan

Hewan/Ternak dan Tumbuhan merupakan nilai Hewan/Ternak dan Tumbuhan per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
2.276.137.909,00	89.226.712,00	0,00	2.365.364.621,00

1.3.6. Kontruksi Dalam Pengerjaan	2010 (Rp)	2009 (Rp)
	76.256.246.000,00	78.038.521.330,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal Neraca belum selesai dibangun seluruhnya per 31 Desember 2010 yang terdiri dari:

Saldo Awal 1 Januari 2010 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2010 (Rp)
80.730.298.278,00	20.673.206.630,00	25.147.258.908,00	76.256.246.000,00

2. Kewajiban Sebesar Rp242.823.028,00

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kota Ternate juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota Ternate atau dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

2.1. Kewajiban Jangka Pendek	2010 (Rp)	2009 (Rp)
	242.823.028,00	465.284.967,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan penilaian utang dengan menggunakan nilai nominal yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo, dengan saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp242.823.028,00.

Terdapat perubahan penyajian saldo awal 1 Januari 2010 dibandingkan saldo akhir Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate dari semula sebesar Rp465.284.967,00 menjadi sebesar Rp169.147.139,00 karena saldo per 31 Desember 2009 masih mencatat utang kepada rekanan sebesar Rp296.137.828,00 berupa pembayaran kepada pihak ketiga yang sudah diterbitkan SP2D tetapi belum dicairkan rekanan dan sudah dicatat sebagai realisasi belanja tahun 2009. Realisasi pencairan sebesar Rp296.137.828,00 telah dilakukan oleh penyedia barang/jasa dari rekening Kas Daerah pada bulan Januari 2010.

(1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Merupakan utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum sebesar **Rp242.823.028,00** dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	BUD PFK Pengadaan Barang dan Jasa	244.336.007,00
2	BUD PFK Gaji	594.030,00
3	Dinas Pendidikan	(2.650.000,00)
4	Dinas Pariwisata	454.545,00
5	Kecamatan Pulau Ternate	(82.000,00)
6	Kantor Infokom	170.446,00
	Jumlah	242.823.028,00

Saldo utang PFK tersebut termasuk saldo utang PFK bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan, Kecamatan Pulau Ternate dan Kantor Infokom yang disajikan minus sebesar Rp2.902.446,00.

Berdasarkan data di atas diketahui saldo utang PFK BUD adalah sebesar Rp244.930.037,00 sedangkan berdasarkan perhitungan buku pembantu pajak dan transaksi penerimaan dan penyetoran PFK Tahun 2010, saldo akhir PFK BUD adalah sebesar Rp310.201.759,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp65.271.722,00.

Terdapat penyetoran PFK di tahun 2010 sebesar Rp19.181.464,00 atas penerimaan PFK di tahun 2009 yang tidak menjadi bagian saldo utang PFK per 31 Desember 2009.

(2) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2010 sebesar Nihil. Terdapat perubahan penyajian saldo awal 1 Januari 2010 dibandingkan saldo akhir Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate dari semula sebesar Rp296.137.828,00 menjadi nihil karena utang PFK per 31 Desember 2009 masih mencatat utang kepada rekanan sebesar Rp296.137.828,00 berupa pembayaran kepada pihak ketiga yang sudah diterbitkan SP2D tetapi belum dicairkan rekanan dan sudah dicatat sebagai realisasi belanja tahun 2009. Realisasi pencairan sebesar Rp296.137.828,00 telah dilakukan oleh penyedia barang/jasa dari rekening Kas Daerah pada bulan Januari.

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya pada Neraca tidak/belum termasuk hutang retensi kepada rekanan-rekanan yang pekerjaannya secara fisik dan dokumen sudah selesai dikerjakan 100%, namun belum dibayarkan 100% karena menunggu masa pemeliharaan diselesaikan.

3. Ekuitas Dana Sebesar Rp968.041.935.500,00

Ekuitas Dana	2010 (Rp)	2009 (Rp)
	968.041.935.500,00	824.867.156.340,43

Ekuitas Dana merupakan pos pada Neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari dua kelompok, terdiri dari:

3.1. Ekuitas Dana Lancar	2010 (Rp)	2009 (Rp)
	15.707.989.088,00	8.689.544.034,00

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok ekuitas dana lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SiLPA, Pendapatan yang ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	SiLPA	6.843.069.059,00
2	Cadangan Piutang	6.835.883.729,00
3	Pendapatan yang Ditangguhkan	0,00
4	Cadangan Persediaan	2.029.036.300,00
5	Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	0,00
	Jumlah	15.707.989.088,00

3.2. Ekuitas Dana Investasi	2010 (Rp)	2009 (Rp)
	952.333.946.412,00	816.177.612.306,43

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan Pemerintah Kota Ternate yang tertanam dalam aset non lancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

1. Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang

Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang sebesar Rp10.738.272.265,43.

2. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap merupakan akun lawan dari aset tetap sebesar Rp941.595.674.146,57.

B. Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan Sebesar Rp458.814.473.921,00

Realisasi Pendapatan untuk periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp458.814.473.921,00 atau 98,56% dari target pendapatan periode tersebut sebesar Rp465.502.127.800,00. Realisasi pendapatan tahun 2010 mengalami *penurunan* sebesar Rp594.197.291,00 atau 0,13% dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2009 sebesar Rp459.408.671.212,00.

Penjelasan lebih lanjut dari pos-pos Pendapatan dapat dirinci sebagai berikut:

1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp21.442.993.424,00 atau 79,70% dari target sebesar Rp26.905.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami *penurunan* sebesar Rp1.699.618.806,00 atau 7,34% dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2009 sebesar Rp23.142.612.230,00.

Hasil perbandingan realisasi pendapatan asli daerah dengan penerimaan bersih PAD yang masuk ke rekening Kas Daerah setelah dikurangi penyetoran anggaran dari bendahara pengeluaran (pengembalian uang persediaan tahun 2009, pengembalian uang persediaan/sisa tambahan uang tahun berjalan, dan pengembalian belanja tahun berjalan) menunjukkan perbedaan sebesar Rp1.287.758.367,00. Selisih tersebut diantaranya pengembalian tunjangan sertifikasi guru yang diterima di tahun 2009 dicatat mengurangi pendapatan sebesar Rp822.675.000,00 sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp465.083.367,00.

Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

1.1.1 Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp8.187.014.548,00 atau 93,03% dari target sebesar Rp8.800.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami *kenaikan* sebesar Rp174.790.748,00 atau 2,18% dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp8.012.223.800,00.

Realisasi tersebut terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pajak Hotel	844.677.511,00
2	Pajak Restoran	1.017.904.162,00
3	Pajak Hiburan	36.029.750,00
4	Pajak Reklame	606.597.700,00
5	Pajak Penerangan Jalan	4.390.135.425,00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	1.291.670.000,00
	Jumlah	8.187.014.548,00

1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah sebesar Rp9.847.526.379,00 atau 83,07% dari target sebesar Rp11.855.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami *kenaikan* sebesar Rp49.470.133,00 atau 0,50% dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp9.798.056.246,00. Realisasi tersebut terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Ret. Pelayanan Kesehatan	404.950.500,00
2	Ret. Pelayanan Kebersihan	992.218.130,00
3	Ret. Penggantian Cetak KTP	435.675.000,00
4	Ret. Parkir	621.040.000,00
5	Ret. Pasar	3.250.303.585,00
6	Ret. Pengujian Kendaraan	112.060.000,00
7	Ret. Pemeriksaan Alat Pemadam	439.902.489,00
8	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	41.800.000,00
9	Ret. Terminal	221.000.000,00
10	Ret. Penyedotan Kakus	17.750.000,00
11	Ret. IMB	707.373.475,00
12	Ret. Izin Gangguan	1.234.012.925,00
13	Ret. Izin Trayek	33.250.000,00
14	Ret. Izin Usaha Pariwisata	85.852.000,00
15	Ret. Izin Rekreasi dan Hiburan Umum	89.945.000,00
16	Ret Pemasukan Pengeluaran Hewan	48.710.000,00
17	Ret. Rumah Potong Hewan	47.000.000,00
18	Ret. Tempat Khusus Parkir	230.900.000,00
19	Ret. Penggantian Biaya Cetak Bahan Pengadaan	40.925.000,00
20	Ret. Jasa Pelabuhan Laut	47.791.000,00
21	Ret. Izin Usaha Perdagangan	204.450.000,00
22	Ret. Izin Usaha Jasa Konstruksi	30.350.000,00
23	Ret. Izin Usaha Angkutan Sewa	14.500.000,00
24	Ret. Izin Usaha Penunjang Angkutan Laut	0,00
25	Ret. Tanda Daftar Perusahaan	200.000.000,00
26	Ret. Pemanfaatan Kayu Olahan	32.277.500,00
27	Ret. Pengukuran Kapal (Pas Kecil)	23.700.000,00
28	Ret. Tanda Daftar Gudang	28.150.000,00
29	Ret. Izin Perikanan	176.189.775,00
30	Ret. Izin Angkutan Barang	32.950.000,00
31	Ret. Tanda Daftar Industri	2.500.000,00
32	Ret. Surat izin Usaha Industri	0,00
	Jumlah	9.847.526.379,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp304.761.759,00 atau 101,59% dari target sebesar Rp300.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp175.896.458,00 atau 136,50% dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp128.865.301,00. Pendapatan ini seluruhnya merupakan pembagian laba atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Maluku.

1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp3.103.690.738,00 atau 52,16% dari target sebesar Rp5.950.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami *penurunan* sebesar Rp2.099.776.145,00 atau 40,35% dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp5.203.466.883,00.

1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan dari Pemerintah Provinsi. Realisasi pendapatan transfer tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp417.075.237.962,00 atau 99,83% dari target sebesar Rp417.790.455.800,00. Realisasi tersebut mengalami *penurunan* sebesar Rp10.817.813.670,00 atau 2,53% dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp427.893.051.632,00.

Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:

1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar Rp362.346.090.819,00 atau 100,84% dari target sebesar Rp359.343.668.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp674.245.045,00 atau 0,19% dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp363.020.335.864,00.

Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Transfer sebagai berikut:

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Bagi Hasil Pajak sebesar Rp49.407.571.701,00 atau 117,56% dari target sebesar Rp42.028.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami *peningkatan* sebesar Rp8.738.856.378,00 atau 21,49% dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp40.668.715.323,00.

Realisasi tersebut terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bagi Hasil dari PBB	31.039.883.308,00
2	Bagi Hasil dari BPHTB	5.339.692.137,00
3	Bagi Hasil dari PPh	13.027.996.256,00
	Jumlah	49.407.571.701,00

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp6.999.851.118,00 atau 61,53% dari target sebesar Rp11.377.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami *kenaikan* sebesar Rp373.682.577,00 atau 5,64% dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp6.626.168.541,00.

Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tersebut terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	PSDH	714.906.191,00
2	Royalti	6.151.610.416,00
3	Perikanan	133.334.511,00
	Jumlah	6.999.851.118,00

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum posisi sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp281.284.868.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp281.284.868.000,00. Realisasi tersebut mengalami *kenaikan* sebesar

Rp19.190.516.000,00 atau 7,32% dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp262.094.352.000,00.

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp24.653.800.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp24.653.800.000,00. Realisasi tersebut mengalami *penurunan* sebesar Rp28.977.300.000,00 atau 54,03% dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp53.631.100.000,00.

1.2.2 Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar Rp43.866.312.800,00 atau 96,26% dari target sebesar Rp45.569.787.800,00. Realisasi tersebut mengalami *kenaikan* sebesar Rp12.773.385.200,00 atau 22,55% dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp56.639.698.000,00. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk tahun 2010 Pemerintah Kota Ternate hanya mendapatkan Dana Penyesuaian.

1.2.3 Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp10.862.834.343,00 atau 84,36% dari target sebesar Rp12.877.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami *kenaikan* sebesar Rp2.629.816.575,00 atau 31,94% dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp8.233.017.768,00.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi hanya berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak, yang terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bagi Hasil dari PKB	877.777.713,00
2	Bagi Hasil dari BBNKB	897.650.437,00
3	Bagi Hasil dari PBBKB	9.050.325.364,00
4	Bagi Hasil dari Pajak ABT dan air permukaan	37.080.829,00
	Jumlah	10.862.834.343,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp20.296.242.535,00 atau 97,55% dari target sebesar Rp20.806.672.000,00. Realisasi tersebut mengalami *kenaikan* sebesar Rp11.923.235.185,00 atau 142,40% dari realisasi tahun 2009 Rp8.373.007.350,00.

2. Belanja

Realisasi Belanja periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp454.843.014.632,00 atau 93,17% dari anggaran sebesar Rp488.170.772.768,00. Realisasi Belanja tahun 2010 mengalami *penurunan* sebesar Rp20.391.704.125,00 atau 4,29% dibandingkan dengan realisasi Belanja tahun 2009 sebesar Rp475.234.718.757,00.

Saldo tersebut berbeda dengan jumlah belanja tahun 2010 menurut laporan pertanggungjawaban belanja seluruh SKPD sebesar Rp449.499.316.023,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.343.698.609,00. Hasil rekonsiliasi yang dilakukan menyajikan nilai belanja yang berbeda dari tiga laporan yaitu: (1). Laporan Pertanggungjawaban Belanja SKPD Tahun 2010 menyajikan realisasi belanja sebesar Rp455.050.229.066,00; (2). SP2D

Definitif dikurangi pengembalian belanja menyajikan realisasi belanja sebesar Rp452.510.680.746,00; dan (3). Laporan Perhitungan sisa uang persediaan tahun 2010 menyajikan realisasi belanja sebesar Rp455.146.812.729,00.

Penjelasan lebih lanjut dari pos-pos Belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp353.604.112.994,00 atau 91,77% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp385.314.183.030,00. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2010 mengalami *kenaikan* sebesar Rp41.483.652.818,00 atau 13,29% dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp312.120.460.176,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Pegawai	259.647.323.399,00
2	Belanja Barang & Jasa	75.010.001.747,00
3	Bantuan Hibah	12.770.343.188,00
4	Bantuan Sosial	6.176.444.660,00
	Jumlah	353.604.112.994,00

Adapun penjelasan lebih lanjut dari pos-pos Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp259.647.323.399,00 atau 91,65% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp283.297.711.411,00. Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2010 mengalami *kenaikan* sebesar Rp38.335.898.089,00 atau 17,32% dari realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp221.311.425.310,00.

Rincian belanja pegawai tersebut terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Gaji dan tunjangan	213.185.175.385,00
Tambahan penghasilan PNS	9.235.809.750,00
Belanja Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.129.660.000,00
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.335.522.032,00
Jumlah Belanja Tidak langsung	224.886.167.167,00
Honorarium PNS	16.410.044.133,00
Honorarium Non PNS	16.751.238.349,00
Uang Lembur	802.569.500,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	105.000.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, sosialisasi dan bintek	692.304.250,00
Jumlah Belanja Langsung	34.761.156.232,00
Jumlah	259.647.323.399,00

2.1.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp75.010.001.747,00 atau 90,65% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp82.742.596.619,00. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2010

mengalami *penurunan* sebesar Rp5.138.055.169,00 atau 6,41% dari realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp80.148.056.916,00.

Realisasi Belanja Barang tersebut terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis	5.131.424.779,00
Belanja Bahan/Material	10.022.477.204,00
Belanja Jasa Kantor	7.757.150.439,00
Belanja Premi Asuransi	837.456.384,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.927.483.063,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	4.454.097.617,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung	2.165.252.250,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	247.389.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	308.580.000,00
Belanja Makan Minum	8.622.557.087,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	508.120.600,00
Belanja Pakaian Kerja	732.978.500,00
Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	163.365.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	24.839.896.724,00
Belanja Perjalanan Pindah Tugas	1.611.640.000,00
Belanja Pemulangan Pegawai	431.705.000,00
Pemeliharaan Gedung	710.813.100,00
Belanja Jasa Konsultansi	2.537.615.000,00
Jumlah	75.010.001.747,00

Atas realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp24.839.896.724,00 diantaranya perjalanan dinas pada dua SKPD sebesar Rp1.842.490.000,00 belum didukung bukti perjalanan dinas berupa tiket pesawat pulang pergi, lembar kunjungan (visum), undangan dari pihak eksternal, kuitansi kontribusi/setoran, dan tidak ada di *manifest* penerbangan. Selain itu terdapat perjalanan dinas yang tidak mencerminkan realisasi yang sebenarnya sebesar Rp79.155.000,00 karena pembayaran biaya transportasi perjalanan dinas yang melebihi rute perjalanan dinas, pembayaran perjalanan dinas pada pegawai yang tidak melakukan perjalanan dinas dan tumpang tindih pembayaran akomodasi penginapan dengan biaya kontribusi kepada penyelenggara kegiatan yang sudah termasuk akomodasi penginapan.

Atas realisasi belanja cetak dan penggandaan sebesar Rp4.454.097.617,00, terdapat pembayaran melebihi nilai pekerjaan yang sebenarnya sebesar Rp141.992.500,00 dan terdapat pembayaran yang bukan dilakukan pada pelaksana pekerjaan yang sebenarnya sebesar Rp216.877.650,00.

Atas realisasi belanja bahan pakai habis sebesar Rp5.131.424.779,00, terdapat pembayaran pekerjaan pengadaan alat tulis kantor yang bukan dilakukan pada pelaksana pekerjaan yang sebenarnya sebesar Rp109.241.000,00.

2.1.3 Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah periode 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp12.770.343.188,00 atau 99,69% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp12.775.000.000,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2010 mengalami *kenaikan* sebesar Rp10.420.343.188,00 atau 443,42% dari realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp2.350.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penggerak PKK	350.000.000,00
2	Darma Wanita	300.000.000,00
3	Pramuka	475.000.000,00
4	Korpri	550.000.000,00
5	Koni Kota Ternate	300.000.000,00
6	PMI	255.590.600,00
7	KPU	8.550.599.400,00
8	Panwaslu	1.989.153.188,00
	Jumlah	12.770.343.188,00

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2010 adalah sebesar Rp6.176.444.660,00 atau 99,64% dari anggaran sebesar Rp6.198.875.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 mengalami *penurunan* sebesar Rp2.134.533.290,00 atau 25,68% dari realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp8.310.977.950,00.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Bantuan Sosial Biaya Pemakaman Masyarakat Kurang Mampu	350.000.000,00
2	Bantuan Pendidikan	615.125.000,00
3	Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	4.693.648.650,00
4	Partai Politik	517.671.010,00
	Jumlah	6.176.444.660,00

2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp100.569.236.838,00 atau 98,74% dari anggaran yang tersedia Rp101.856.589.738,00. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2010 mengalami *penurunan* sebesar Rp60.468.888.343,00 atau 37,54% dari realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp161.038.125.181,00.

Belanja Modal terdiri dari:

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Tanah	3.250.475.000,00	3.085.923.938,00	94,94
Peralatan dan Mesin	16.287.823.367,00	15.997.831.896,00	98,22
Gedung dan Bangunan	30.219.284.991,00	29.451.379.467,00	97,46
Jalan, Irigasi & Jaringan	48.459.558.380,00	48.422.537.364,00	99,92
Aset Tetap Lainnya	3.288.698.000,00	3.300.291.078,00	100,35
Aset lainnya	350.750.000,00	311.273.095,00	88,75
Jumlah	101.856.589.738,00	100.569.236.838,00	

Atas realisasi belanja modal tahun 2010 sebesar Rp100.569.236.838,00, terdapat selisih sebesar Rp1.763.789.298,24 dengan nilai kenaikan aset tetap menurut Bidang Aset Daerah, yang mencatat nilai kenaikan aset tetap tahun 2010 sebesar Rp102.333.026.136,24. Atas selisih tersebut tidak dapat dijelaskan.

Penjelasan Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

2.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2010 sebesar Rp3.085.923.938,00 atau 94,94% dari anggaran sebesar Rp3.250.475.000,00. Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp523.011.962,00 atau 14,49% dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp3.608.935.900,00.

2.2.2 Belanja Modal Peralatan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan Mesin tahun 2010 sebesar Rp15.997.831.896,00 atau 98,22% dari anggaran sebesar Rp16.287.823.367,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2010 mengalami *penurunan* sebesar Rp5.620.057.954,00 atau 26% dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp21.617.889.850,00. Realisasi tersebut terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	187.790.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor	4.153.657.409,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Air Bermotor	741.120.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel	99.570.800,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian Peternakan	339.940.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	544.908.859,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	660.522.032,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.385.098.390,00
Belanja Modal Pengadaan Mobeulair	1.017.538.624,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	98.076.500,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	308.109.722,00
Belanja Modal Pengadaan Studio	121.223.954,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	192.750.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	206.080.500,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium	4.936.445.106,00
Jumlah	15.997.831.896,00

2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2010 sebesar Rp29.451.379.467,00 atau 97,46% dari anggaran sebesar Rp30.219.284.991,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2010 mengalami penurunan sebesar Rp27.696.194.318,00 atau 48,46% dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp57.147.573.785,00.

2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2010 sebesar Rp48.422.537.364,00 atau 99,92% dari anggaran sebesar Rp48.459.558.380,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2010 mengalami *penurunan* sebesar Rp29.630.701.682,00 atau 37,96% dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp78.053.239.046,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari:

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Modal Konstruksi Jalan	30.611.555.220,00
Belanja Modal Konstruksi Jembatan	55.241.000,00
Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air	16.985.890.144,00
Belanja Modal Pegadaaan Penerangan Jalan Tamanl	466.538.000,00
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	303.313.000,00
Jumlah	48.422.537.364,00

2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2010 sebesar Rp3.300.291.078,00 atau 100,35% dari anggaran sebesar Rp3.288.698.000,00. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya mengalami *kenaikan* sebesar Rp2.689.804.478,00 atau 440,60% dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp610.486.600,00.

2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya tahun 2010 sebesar Rp311.273.095,00 atau 88,75% dari anggaran sebesar Rp350.750.000,00. Realisasi belanja modal aset lainnya mengalami *kenaikan* sebesar Rp311.273.095,00 dari realisasi tahun 2009 sebesar Rp0,00.

2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2010 sebesar Rp669.664.800,00 atau 66,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2010 mengalami *penurunan* sebesar Rp1.406.468.600,00 atau 67,74% dari realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp2.076.133.400,00.

Realisasi sebesar tersebut terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penanggulangan Bencana	457.219.800,00
2	Penanggulangan Penyakit	212.445.000,00
	Jumlah	669.664.800,00

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang akan dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggarnya dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan antara lain untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah dan pembentukan dana cadangan.

3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan tahun 2010 diperoleh dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp2.871.609.770,00. Nilai penggunaan SiLPA tersebut tidak berdasarkan nilai SiLPA dalam LRA Tahun 2009 sebesar Rp2.632.445.166,00 atau terdapat selisih sebesar Rp239.164.604,00.

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2010 adalah sebesar nihil.

4. SiLPA Tahun Berjalan

Perhitungan SiLPA dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Realisasi Pendapatan	458.814.473.921,00
2	Realisasi Belanja	(454.843.014.632,00)
3	Surplus/Defisit	3.971.459.289,00
4	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	2.871.609.770,00
	Jumlah	6.843.069.059,00

C. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Arus Kas Pemerintah Kota Ternate selama tahun 2010 mengalami *peningkatan bersih* sebesar Rp4.047.545.915,00. Jumlah ini diperoleh dari *selisih lebih* Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp104.540.696.127,00, *selisih kurang* Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp100.569.236.838,00, dan *selisih lebih* Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp76.086.626,00. Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2010 sebesar Rp6.730.455.459,00. Di samping itu terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp355.436.628,00 sehingga jumlah keseluruhan Kas adalah sebesar Rp7.085.892.087,00.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi *positif* sebesar Rp104.540.696.127,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Arus Masuk Kas	458.814.473.921,00
2	Arus Keluar Kas	354.273.777.794,00
	Arus Kas Bersih	104.540.696.127,00

1.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp458.814.473.921,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	8.187.014.548,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	9.847.526.379,00
3.	Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	304.761.759,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	3.103.690.738,00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak	49.407.571.701,00
6.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.999.851.118,00
7.	Dana Alokasi Umum	281.284.868.000,00
8.	Dana Alokasi Khusus	24.653.800.000,00
9.	Dana Penyesuaian	43.866.312.800,00
11.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	10.862.834.343,00
12.	Pendapatan Hibah	20.296.242.535,00
13.	Bantuan Keuangan Pasca Bencana	0,00
Jumlah		458.814.473.921,00

1.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas untuk Aktivitas Operasi sebesar Rp354.273.777.794,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Belanja Pegawai	259.647.323.399,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	75.010.001.747,00
3.	Belanja Hibah	12.770.343.188,00
4.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	0,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	6.176.444.660,00
6.	Belanja Tidak Terduga	669.664.800,00
Jumlah		354.273.777.794,00

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah *negatif* sebesar Rp104.072.768.842,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Arus Masuk Kas	0,00
2.	Arus Keluar Kas	100.569.236.838,00
Arus Kas Bersih		(100.569.236.838,00)

2.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah nihil.

2.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah sebesar Rp100.569.236.838,00 merupakan Belanja Modal berupa pembelian/pengadaan:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Tanah	3.085.923.938,00
2.	Peralatan dan Mesin	15.997.831.896,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	29.451.379.467,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	48.422.537.364,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.300.291.078,00
6.	Belanja Aset Lainnya	311.273.095,00
Jumlah		100.569.236.838,00

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp0,00 terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Arus Masuk Kas	0,00
2.	Arus Keluar Kas	0,00
Arus Kas Bersih		0,00

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp76.086.626,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Arus Masuk Kas	31.255.289.343,00
2.	Arus Keluar Kas	31.179.202.717,00
Arus Kas Bersih		76.086.626,00

4.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp31.255.289.343,00 merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) di Kas Daerah yang berasal dari pemotongan PFK Gaji sebesar Rp20.034.616.876,00 dan pemungutan dan pemotongan pajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pihak ketiga sebesar Rp11.220.672.467,00.

4.2 Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp31.179.202.717,00 merupakan penyeteroran Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dari Kas Daerah atas pemotongan PFK Gaji sebesar Rp20.034.022.846,00 dan pemungutan dan pemotongan pajak atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pihak ketiga sebesar Rp11.145.179.871,00.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- a. Masih lemahnya SDM di bidang akuntansi menyebabkan belum sepenuhnya penerapan peraturan perundang-undangan dijalankan, sehingga fungsi SKPD sebagai entitas akuntansi belum berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Penerapan aturan perundang-undangan baru pada tahun berjalan seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang merubah entitas akuntansi.
- c. Infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai seperti komputer, sistem jaringan, dan *software*.

BAB VII

P E N U T U P

Dari rasio-rasio keuangan tersebut di atas, apabila kita mengukur likuiditas keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2010 dengan menggunakan *Current Ratio* (Rasio Lancar), yaitu membandingkan antara *Current Asset* (Harta Lancar) dan *Current Liability* (Hutang Lancar), dimana Harta Lancar sebesar **Rp15.950.812.116,00** dan **Hutang Lancar** sebesar **Rp242.823.028,00**, maka likuiditas keuangan Pemerintah Kota Ternate dapat dikategorikan dalam kondisi “**Likuid**” (sehat). Artinya Pemerintah Kota Ternate meskipun memiliki hutang kepada pihak ketiga, tetapi masih sanggup memenuhi kewajiban tersebut, misalnya hutang kepada rekanan pada pekerjaan lanjutan walaupun masih mengalami defisit anggaran di tahun berikutnya.